

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINISASI COVID- 19 BAGI
MASYARAKAT LANSIA DI KECAMATAN BUNUT KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2021**

Oleh : Vella Viki Oktavia

Pembimbing: Zulfa Harirah MS, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The vaccination policy is the government's effort to deal with the Covid-19 pandemic, especially for the elderly who are vulnerable to transmission of the Covid-19 virus. Bunut Sub-district has the least number of targets, but the coverage of Covid-19 vaccinations for the elderly in Bunut Sub-district is still below the ideal target. The focus of this study discusses the implementation of the Covid-19 vaccination policy for the elderly in the Bunut Sub-District Pelalawan District in 2021. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques with interview, observation and documentation techniques. This research will describe how the implementation of the Covid-19 vaccination policy for the elderly in the Bunut Sub-District, using the Van Meter and Van Horn theories. The research results show that implementation of Covid-19 vaccination for the elderly has not been optimal. This can be seen from the 6 indicators . First, the delivery of covid-19 vaccination for the elderly is slow and has not yet reached the target. Second, resources are not sufficient, because not yet supported by completeness, lack of funds or finances and maintenance of the quality of the Covid-19 vaccine. Third, the lack of communication from the puskesmas with other organizations such as village heads and religious organizations has resulted in slow Covid-19 vaccination especially for the elderly. Fourth, attitude the tendency of the executors is still lacking, seen from the discipline of the implementing staff in reporting. The effort to provide services with ball pick-up system such as door-to-door vaccination is not optimal.

Keywords: Policy Implementation, Vaccination Covid-19, Elderly

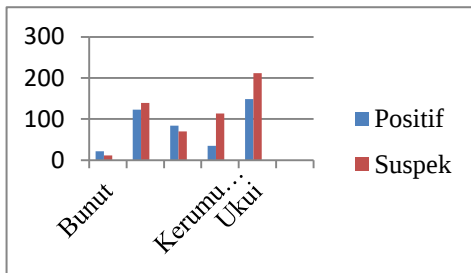
PENDAHULUAN

Coronavirus merupakan penyakit *Severe Acute Respiratory* (SARS) pada tahun 2003 dan kembali ditemukan mutasi virus yang lebih kuat pada tahun 2019 yang muncul dipasar grosir makanan laut, di Provinsi Wuhan, China tepatnya pada Desember 2019.

Kecamatan Bunut merupakan salah satu kecamatan di kabupaten pelalawwan yang memiliki riwayat penyebaran *coronavirus disease* 2019 (covid-19), yang mana sebaran kasus covid di Kecamatan Bunut pada tanggal 27 mei 2021 yang terkonfirmasi 22 kasus dan suspek 12 kasus. Berikut ini Data Kasus Covid-

19 di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021.

Grafik : Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Pelalawan Per-27 Mei 2021



Organisasi Kesehatan Dunia resmi mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemic global. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terkena dampak Covid-19 di seluruh sector, mulai dari sector ekonomi, pendidikan social dan tentunya sector kesehatan. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai upaya pengendalian laju Covid-19 dengan mempertimbangkan segala aspek, seperti kebijakan PSBB hingga kebijakan vaksinasi..

Kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan upaya pemerintah untuk menangani pandemic covid-19 yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Selanjutnya terdapat aturan pelaksanaan/turunan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Kecamatan Bunut merupakan wilayah di Kabupaten Pelalawan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yang mana jumlah penduduk di Kecamatan Bunut berjumlah 15.620,00 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk untuk lanjut usia berjumlah 749 jiwa. Namun , Kecamatan Bunut menjadi salah satu wilayah yang capaian vaksinnnya paling rendah khususnya masyarakat lansia di Kabupaten Pelalawan, berikut ini data vaksinasi covid-19 masyarakat lansia di Kabupaten Pelalawan pada tahun

Kecamatan	Sasaran	Dosis 1	Dosis 2
Langgam	918	53	19
Pangkalan Kerinci	1.183	441	139
Seikijang	610	76	53
Pangkalan Kuras	992	62	24
Bunut	749	20	11
Bandar Petalangan	760	103	45
Pangkalan Lesung	980	311	127
Ukui	1.083	317	249
Kerumutan	900	369	122
Teluk Meranti	1.098	85	312
Kuala Kampar	1.186	248	81

2021:

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lansia Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Pada Tahun 2021 ?

Tujuan Penelitian

Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lansia Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Pada Tahun 2021.

Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kata kebijakan berasal dari bahasa inggris '*Policy*' yang diartikan oleh Purwadarminta sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dsb.)

Kebijakan dapat di definisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (actor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu factor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Kebijakan dapat di definisikan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana yang cocok dan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah (Dr. Drs. Awan Y, Abdoellah, 2016).

Kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni :

- a) Kebijakan merupakan praktisi social, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
- b) Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, kebijakan dapat dinyatakan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Sedangkan Kebijakan Publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan

kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu (Budi Winarno, 2002).

Mengenai kebijakan public, Wahab (2010) menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan public merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak
- b. Kebijakan public pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
- c. Kebijakan public berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public ialah serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, sehingga untuk efektivitas kebijakan public diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Solichin Abdul Wahab (1991) mengemukakan ciri-ciri

kebijakan public ialah sebagai berikut :

Pertama, kebijakan public lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

Kedua, kebijakan public itu berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Dalam artian setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret.

Ketiga, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

2. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn

Terdapat beberapa teori mengenai implementasi kebijakan public dari para ahli beserta arti dari implementasi kebijakan public itu sendiri, salah satunya Meter dan Van Horn dalam Kadji (2015) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa variable yang mempengaruhi proses kebijakan public yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya

3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Agen Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Arifi dalam (Agustinova, 2015) mendefinisikan penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang dilaksanakan secara alamiah berdasarkan keadaan tanpa direkayasa serta jenis data yang dikumpulkannya yakni data deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT LANSIA KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021

Pelaksanaan vaksinasi lansia di wilayah Kecamatan Bunut dimulai pada 14 Januari yang bertempat di Puskesmas Ceria Kecamatan Bunut. Berdasarkan analisis di lapangan terdapat beberapa alasan mengapa sebagian lansia takut untuk divaksinasi Covid yakni : (a) Takut mengalami efek samping seperti demam, nyeri atau tidak nyaman, (b) kurangnya informasi yang mengakibatkan banyak lansia mungkin tidak memiliki akses informasi yang akurat tentang vaksin, (c) factor psikologis, ketakutan akan vaksin adalah factor utama mengapa banyak lansia menolak untuk divaksinasi, ini bias disebabkan kurangnya kepercayaan pada system perawatan kesehatan

atau ketakutan umum terhadap prosedur medis.

Oleh karena itu dengan adanya dasar hasil wawancara peneliti dengan informan observasi peneliti dan hasil dokumentasi peneliti tentang implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan maka pembahasan dalam penelitian ini didukung oleh Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Teori Meter dan Horn yang dalam (Kadji, 2015) yang mana terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan yakni :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Agen Pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Jumlah penyebaran covid-19 di Kecamatan Bunut tercatat pada bulan Mei 2021 berjumlah 22 kasus dan suspek 12 kasus. Lalu pada bulan Juli 2021 terjadi penambahan yakni Kecamatan Kerumutan 52 kasus, Bunut 50 kasus, Pangkalan Lesung 25 Kasus, Pelalawan 32 kasus dan Kecamatan Bandar Petalangan 32 kasus. Sehingga dengan jumlah angka penyebaran covid-19 yang semakin meningkat Pemerintah Kabupaten Pelalawan menargetkan Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19 guna memutus penyebaran covid-19 di Kabupaten Pelalawan.

Adapun yang peneliti temukan di lapangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi

Covid-19 Bagi Masyarakat Lansia di Kecamatan Bunut dengan menggunakan teori Metter dan Van Horn (Kadji, 2015) ialah sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Variable ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap factor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indicator kinerja merupakan tahapan krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pemerintah Kecamatan Bunut telah menetapkan jumlah target sasaran vaksinasi Covid-19 bagi lansia yang berjumlah 749 lansia, akan tetapi untuk menjangkau target sasaran tersebut terdapat kendala terkait lansia yang belum divaksinasi sehingga menyulitkan Pemerintah Kecamatan Bunut dalam membuat terobosan baru yakni melakukan giat Avatar (ajak vaksin dan antar), akibat tidak mempunyai data yang dapat menjadi acuan maka para pelaksana mengimplementasikan kebijakan berusaha secara optimal dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 juga bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana berkaitan dengan konteks beberapa kebijakan dituntut pelaksana untuk tegas dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang lebih persuasive dan demokratis. Selain itu juga diperlukan pengawasan dan control hierarki kepada pelaksana terbawah pada saat implmentasi (Taher et al, 2022). Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan sukses di lapangan, maka harus didukung oleh struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang kompleks, Kerjasama dari badan-badan pelaksana diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif untuk melaksanakan kebijakan, hal ini akan berdampak pada sumber daya yang tidak efektif dan menghambat implementasi kebijakan.

4. Sikap Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 puskesmas Kecamatan Bunut melibatkan bidang-bidang tertentu, seperti Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang berperan mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Koordinasi dengan lintas program dan lintas sector. Bidang

Promosi Kesehatan berperan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media publikasi kegiatan pelaksanaan Covid-19 dan menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selain itu, Puskesmas Bunut juga melibatkan lintas sector, seperti Polsek Bunut, Babinkamtinnas.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia di Kecamatan Bunut Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Kadji: 2015) pada aspek standar dan sasaran kebijakan, cakupan vaksinasi Covid-19 bagi lanjut usia berjalan lambat dan belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada aspek sumber daya, belum di dukung kelengkapan , kurangnya dana/ finansial dan pemeliharaan kualitas vaksin covid-19. Pada aspek karakteristik agen pelaksana kepala puskesmas terkesan cuek dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Bunut, Pada aspek sikap agen pelaksana yaitu kurangnya kedisiplinan puskesmas sebagai agen pelaksana dalam pelaporan data-data terkait vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Bunut. Serta pada aspek komunikasi antarorganisasi, kurangnya komunikasi antara kepala puskesmas dengan organisasi lainnya seperti lurah dan organisasi keagamaan yang mengakibatkan lambatnya vaksinasi

covid-19 bagi lansia di Kecamatan Bunut.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas terkait pembahasan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lansia di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2021, maka ada beberapa saran yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Perlu melakukan inventarisasi ulang terhadap kelengkapan dan memiliki pemeliharaan kualitas vaksin yang sesuai dengan jenis vaksin.
2. Perlu adanya komunikasi yang efektif, berkompetensinya sumber daya manusia, agar keraguan mengenai vaksin di kalangan masyarakat dapat hilang.
3. Penting untuk terus menerus menyosialisasikan pentingnya vaksinasi dan menyediakan akses vaksinasi bagi penduduk lanjut usia.
4. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien, hal ini dapat dicapai dengan mengatasi kekurangan dalam proses implementasi, memperkuat komunikasi dan sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

BUKU

Abdoellah, A.Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Handoyo,E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

John W.Creswell. (2016). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Celeban Timur: Pustaka Pelajar

Miriam Budiardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

P. Anthonius Sitepu. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Samodra Wibawa. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPi

Yulianto Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press

Jurnal

Dita Retno Pratiwia. (2022). Determinan Kepatuhan Terhadap Vaksin Covid-19 Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Suela Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 166-169

Febiola Utami dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 43-44

Nurlailah. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Ogan Komering. *Jurnal Unbara*, 61-67

Samsul Ode dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 162-169

Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Covid-19

Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Intruksi Gubernur Riau Nomor 348 Tahun 2020 Tentang Persiapan Penyelenggaraan Vaksinasi Corona Virus Disese 2019

Media Online

Catatanriau 2022. Kapolsek Bunut Pimpin Giat Percepatan Vaksinasi di Wilayah Hukumnya.

(<https://catatanriau.com>).

Akses 5 Januari 2024.

Liputan6 2021. Kepala Puskesmas 'Loyo' Bikin Vaksinasi Covid-19 di Pelalawan Jadi yang Terendah.

(<https://www.liputan6.com>).

Akses 24 September 2023.

Antaranews 2021. Alasan Lansia Perlu Rentang 28 Hari untuk Vaksinasi Covid-19 Kedua.

(<https://www.antaranews.com>

). Akses 19 September 2023.